



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.615, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. Pajak.
Cukai. Tahun Anggaran 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161/PMK.07/2011
TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN
ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah sebesar Rp73.382.802.600,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp22.659.520.860,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp653.322.393,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp270.865.618,00 (dua ratus

tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp7.221.662.095,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah);
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.322.248,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- f. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp42.529.109.386,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (6) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Khusus Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp10.639.095,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) dan Kota Tangerang sebesar Rp15.999.089,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) telah diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran Tahun Anggaran 2008 masing-masing sebesar Rp73.246.413,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2011.
- (2) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
 DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN)	DBH PPh Pasal 21	JUMLAH
1.	Kota Banda Aceh	39,727,846		39,727,846
2.	Kota Medan	-	157,750,113	157,750,113
3.	Provinsi Sumatera Barat	55,099,709		55,099,709
4.	Kota Padang	323,217,750		323,217,750
5.	Kota Batam	-	143,925,946	143,925,946
6.	Kab. Bungo	205,090,693		205,090,693
7.	Kota Jambi	112,074,537		112,074,537
8.	Provinsi Sumatera Selatan	85,343,426		85,343,426
9.	Kota Palembang	588,578,170	127,111,563	715,689,733
10.	Kota Lubuk Linggau	54,898,532		54,898,532
11.	Kota Bandar Lampung	52,614,372		52,614,372
12.	Provinsi DKI Jakarta	5,017,472,921		5,017,472,921
13.	Provinsi Jawa Barat	393,910,546		393,910,546
14.	Kab. Bandung	148,738,922		148,738,922
15.	Kab. Bekasi	872,370,362	211,491,932	1,083,862,294
16.	Kab. Bogor	147,403,539		147,403,539
17.	Kab. Ciamis	65,938,535		65,938,535
18.	Kab. Cianjur	75,240,721		75,240,721
19.	Kab. Cirebon	54,004,850		54,004,850
20.	Kab. Garut	48,280,354		48,280,354
21.	Kab. Indramayu	50,263,284		50,263,284
22.	Kab. Karawang	247,263,815		247,263,815
23.	Kab. Kuningan	51,858,746		51,858,746
24.	Kab. Majalengka	55,094,006		55,094,006
25.	Kab. Purwakarta	54,834,689		54,834,689

No.	Daerah	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN)	DBH PPh Pasal 21	JUMLAH
26.	Kab. Subang	40,744,601		40,744,601
27.	Kab. Sukabumi	39,882,149		39,882,149
28.	Kab. Sumedang	64,881,016		64,881,016
29.	Kab. Tasikmalaya	40,115,247		40,115,247
30.	Kota Bandung	756,060,675	350,612,392	1,106,673,067
31.	Kota Bekasi	101,512,778		101,512,778
32.	Kota Cirebon	185,652,959		185,652,959
33.	Kota Depok	50,198,692		50,198,692
34.	Kota Sukabumi	48,606,798		48,606,798
35.	Kota Cimahi	136,456,160		136,456,160
36.	Kota Tasikmalaya	122,602,315		122,602,315
37.	Kota Banjar	49,187,024		49,187,024
38.	Kab. Bandung Barat	110,205,088		110,205,088
39.	Kota Tangerang	-	125,212,573	125,212,573
40.	Kota Tangerang Selatan	888,624,272	212,614,277	1,101,238,549
41.	Provinsi Jawa Tengah	137,787,532		137,787,532
42.	Kab. Banjarnegara	41,505,114		41,505,114
43.	Kab. Banyumas	98,619,854		98,619,854
44.	Kab. Blora	38,559,379		38,559,379
45.	Kab. Cilacap	120,293,093		120,293,093
46.	Kab. Jepara	87,348,833		87,348,833
47.	Kab. Kebumen	47,151,044		47,151,044
48.	Kab. Kendal	47,597,929		47,597,929
49.	Kab. Pati	62,391,060		62,391,060
50.	Kab. Purbalingga	41,788,659		41,788,659
51.	Kab. Purworejo	38,721,059		38,721,059
52.	Kab. Rembang	39,130,833		39,130,833
53.	Kab. Semarang	57,233,431		57,233,431
54.	Kab. Sukoharjo	103,592,833		103,592,833
55.	Kota Magelang	90,248,519		90,248,519
56.	Kota Pekalongan	39,059,575		39,059,575
57.	Kota Semarang	459,474,068	167,343,230	626,817,298
58.	Kota Surakarta	103,895,584		103,895,584
59.	Kota Tegal	87,949,170		87,949,170
60.	Provinsi DI Yogyakarta	55,476,294		55,476,294
61.	Kab. Bantul	71,975,002		71,975,002
62.	Kab. Gunung Kidul	50,997,232		50,997,232
63.	Kab. Sleman	180,174,715		180,174,715

No.	Daerah	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN)	DBH PPh Pasal 21	JUMLAH
64.	Kota Yogyakarta	178,856,250		178,856,250
65.	Provinsi Jawa Timur	207,200,620		207,200,620
66.	Kab. Banyuwangi	45,423,910		45,423,910
67.	Kab. Bojonegoro	77,517,207		77,517,207
68.	Kab. Bondowoso	45,327,299		45,327,299
69.	Kab. Gresik	88,558,682		88,558,682
70.	Kab. Jember	51,384,321		51,384,321
71.	Kab. Jombang	69,723,354		69,723,354
72.	Kab. Lamongan	39,483,708		39,483,708
73.	Kab. Malang	60,450,301		60,450,301
74.	Kab. Mojokerto	120,712,485		120,712,485
75.	Kab. Pamekasan	47,282,246		47,282,246
76.	Kab. Sidoarjo	367,740,822		367,740,822
77.	Kab. Tulungagung	52,862,614		52,862,614
78.	Kota Malang	143,700,403		143,700,403
79.	Kota Mojokerto	53,104,129		53,104,129
80.	Kota Surabaya	434,089,367	307,346,821	741,436,188
81.	Kota Singkawang	58,436,951		58,436,951
82.	Provinsi Kalimantan Selatan	273,729,317		273,729,317
83.	Kab. Banjar	77,714,437		77,714,437
84.	Kab. Hulu Sungai Selatan	59,182,994		59,182,994
85.	Kab. Hulu Sungai Tengah	59,424,379		59,424,379
86.	Kab. Hulu Sungai Utara	58,016,076		58,016,076
87.	Kab. Kotabaru	58,973,131		58,973,131
88.	Kab. Tapin	50,592,472		50,592,472
89.	Kota Banjarbaru	68,770,951		68,770,951
90.	Kota Banjarmasin	1,773,313,257		1,773,313,257
91.	Kab. Balangan	58,008,903		58,008,903
92.	Kab. Tanah Bumbu	71,544,843		71,544,843
93.	Kota Manado	154,983,709		154,983,709
94.	Kab. Banggai	39,836,116		39,836,116
95.	Kota Palu	93,225,719		93,225,719
96.	Provinsi Sulawesi Selatan	60,299,493		60,299,493
97.	Kab. Bone	76,299,525		76,299,525
98.	Kota Makassar	196,713,767		196,713,767
99.	Kota Kendari	96,415,656		96,415,656
100.	Provinsi Bali	117,301,711		117,301,711
101.	Kab. Badung	200,348,172		200,348,172

No.	Daerah	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN)	DBH PPh Pasal 21	JUMLAH
102.	Kab. Bangli	39,267,163		39,267,163
103.	Kab. Buleleng	76,120,723		76,120,723
104.	Kab. Gianyar	159,380,499		159,380,499
105.	Kab. Jembrana	62,175,153		62,175,153
106.	Kab. Karangasem	38,496,395		38,496,395
107.	Kab. Tabanan	55,370,770		55,370,770
108.	Kota Denpasar	416,697,921		416,697,921
109.	Kota Mataram	56,756,661		56,756,661
110.	Kota Kupang	92,190,830		92,190,830
111.	Kota Tidore Kepulauan	246,012,282		246,012,282
112.	Kab. Mimika	50,594,617	170,786,100	221,380,717
113.	Kota Sorong	70,692,691		70,692,691
	Total	20,685,325,913	1,974,194,947	22,659,520,860

MENTERI KEUNGAN,
REPUBLIC INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
 DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
 KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat
1	Kab. Padang Lawas Utara	23,357,093
2	Kab. Padang Lawas	23,357,093
3	Kab. Labuhan Batu Selatan	23,357,093
4	Kab. Labuhan Batu Utara	23,357,093
5	Kab. Kepulauan Anambas	23,357,093
6	Kota Sungai Penuh	23,357,093
7	Kab. Bengkulu Tengah	23,357,093
8	Kab. Pesawaran	42,756,884
9	Kab. Tangerang	10,639,095
10	Kota Tangerang	15,999,089
11	Kota Serang	23,357,093
12	Kab. Kubu Raya	23,357,093
13	Kab. Tana Tidung	23,357,093
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	23,357,093
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	23,357,093
16	Kab. Sigi	23,357,093
17	Kab. Toraja Utara	23,357,093
18	Kab. Lombok Utara	23,357,093
19	Kab. Manggarai Timur	23,357,093
20	Kota Tual	23,357,093
21	Kab. Maluku Barat Daya	23,357,093
22	Kab. Buru Selatan	23,357,093

No.	Daerah	DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat
23	Kab. Memberamo Tengah	23,357,093
24	Kab. Yalimo	23,357,093
25	Kab. Lanny Jaya	23,357,093
26	Kab. Nduga	23,357,093
27	Kab. Puncak	23,357,093
28	Kab. Dogiyai	23,357,093
Total		653,322,393

MENTERI KEUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
 DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH PBB Bagian Daerah
1	Provinsi Jawa Tengah	44,482,602
2	Kota Sukabumi	12,821,453
3	Kab. Maluku Tenggara	104,105,250
4	Kab. Kepulauan Aru	109,456,313
Total		270,865,618

MENTERI KEUNGAN,
 REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
 DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010
 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH Biaya Pemungutan PBB TA 2009	DBH Biaya Pemungutan PBB TA 2010	Jumlah
1	Provinsi Kalimantan Selatan	87,407,073	-	87,407,073
2	Kab. Kepulauan Anambas	1,065,807	-	1,065,807
3	Kab. Banjar	47,705,232	-	47,705,232
4	Kab. Barito Kuala	57,500,425	-	57,500,425
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	164,867,277	-	164,867,277
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	26,703,715	-	26,703,715
7	Kab. Kota Baru	268,799,191	-	268,799,191
8	Kab. Tabalong	42,133,949	-	42,133,949
9	Kab. Tapin	13,902,914	-	13,902,914
10	Kota Banjar Baru	49,169,736	-	49,169,736
11	Kota Banjarmasin	210,039,624	-	210,039,624
12	Provinsi Maluku Utara	332,255,467	315,208,456	647,463,923
13	Kab. Halmahera Tengah	454,381,879	426,980,006	881,361,885
14	Kab. Halmahera Barat	416,536,933	368,837,184	785,374,117
15	Kota Ternate	438,140,257	503,613,597	941,753,854
16	Kab. Halmahera Timur	358,093,675	381,250,484	739,344,159
17	Kota Tidore Kepulauan	299,219,832	336,001,898	635,221,730
18	Kab. Halmahera Selatan	445,656,929	500,307,601	945,964,530
19	Kab. Kep. Sula	311,198,984	364,683,970	675,882,954
	Total	4,024,778,899	3,196,883,196	7,221,662,095

MENTERI KEUNGAN,
 REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG
DIBAGIKAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011**

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
1	Kab. Padang Lawas Utara	1,858,548
2	Kab. Padang Lawas	1,858,548
3	Kab. Labuhan Batu Selatan	1,858,548
4	Kab. Labuhan Batu Utara	1,858,548
5	Kab. Kepulauan Anambas	1,858,548
6	Kota Sungai Penuh	1,858,548
7	Kab. Bengkulu Tengah	1,858,548
8	Kab. Pesawaran	1,858,548
9	Kota Serang	1,858,548
10	Kab. Kubu Raya	1,858,548
11	Kab. Tana Tidung	1,858,548
12	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,858,548
13	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,858,548
14	Kab. Sigi	1,858,548
15	Kab. Toraja Utara	1,858,548
16	Kab. Lombok Utara	1,858,548
17	Kab. Manggarai Timur	1,858,548
18	Kota Tual	1,858,548
19	Kab. Maluku Barat Daya	1,858,548
20	Kab. Buru Selatan	1,858,548
21	Kab. Memberamo Tengah	1,858,548
22	Kab. Yalimo	1,858,548
23	Kab. Lanny Jaya	1,858,548
24	Kab. Nduga	1,858,548

No.	Daerah	DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
25	Kab. Puncak	1,858,548
26	Kab. Dogiyai	1,858,548
Total		48,322,248

MENTERI KEUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau
I	Total se-Provinsi Sumatera Utara	272,852,621
1	Provinsi Sumatera Utara	81,855,790
2	Kab. Asahan	2,922,474
3	Kab. Dairi	2,922,474
4	Kab. Deli Serdang	2,922,474
5	Kab. Karo	2,922,474
6	Kab. Labuhan Batu	2,922,474
7	Kab. Langkat	2,922,474
8	Kab. Mandailing Natal	2,922,474
9	Kab. Nias	2,922,474
10	Kab. Simalungun	2,922,474
11	Kab. Tapanuli Selatan	2,922,474
12	Kab. Tapanuli Tengah	2,922,474
13	Kab. Tapanuli Utara	2,922,474
14	Kab. Toba Samosir	2,922,474
15	Kota Binjai	2,922,474
16	Kota Medan	31,105,199
17	Kota Pematang Siantar	78,062,360
18	Kota Sibolga	2,922,474
19	Kota Tanjung Balai	2,922,474
20	Kota Tebing Tinggi	2,922,474
21	Kota Padang Sidempuan	2,922,474
22	Kab. Pakpak Bharat	2,922,474
23	Kab. Nias Selatan	2,922,474
24	Kab. Humbang Hasundutan	2,922,474
25	Kab. Serdang Bedagai	2,922,474
26	Kab. Samosir	2,922,474

No.	Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau
27	Kab. Batu Bara	2,922,474
28	Kab. Padang Lawas Utara	2,922,474
29	Kab. Padang Lawas	2,922,474
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	2,922,474
31	Kab. Labuhan Batu Utara	2,922,474
II	Total se-Provinsi Jawa Barat	4,753,735,220
1	Provinsi Jawa Barat	1,426,513,327
2	Kab. Bandung	55,736,343
3	Kab. Bekasi	1,180,726,590
4	Kab. Bogor	54,844,317
5	Kab. Ciamis	54,929,173
6	Kab. Cianjur	54,961,788
7	Kab. Cirebon	120,767,593
8	Kab. Garut	55,463,249
9	Kab. Indramayu	54,844,317
10	Kab. Karawang	372,858,208
11	Kab. Kuningan	54,874,009
12	Kab. Majalengka	54,918,690
13	Kab. Purwakarta	54,844,317
14	Kab. Subang	54,844,317
15	Kab. Sukabumi	54,844,317
16	Kab. Sumedang	55,205,968
17	Kab. Tasikmalaya	55,177,003
18	Kota Bandung	54,882,055
19	Kota Bekasi	54,844,317
20	Kota Bogor	54,845,475
21	Kota Cirebon	443,394,646
22	Kota Depok	54,844,317
23	Kota Sukabumi	54,844,317
24	Kota Cimahi	54,844,317
25	Kota Tasikmalaya	54,913,386
26	Kota Banjar	55,103,949
27	Kab. Bandung Barat	54,864,915
III	Total se-Provinsi Jawa Tengah	13,123,462,172
1	Provinsi Jawa Tengah	3,937,038,656
2	Kab. Banjarnegara	114,170,911
3	Kab. Banyumas	116,681,490
4	Kab. Batang	149,750,750
5	Kab. Blora	161,089,862

No.	Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau
6	Kab. Boyolali	159,166,727
7	Kab. Brebes	116,067,851
8	Kab. Cilacap	122,621,518
9	Kab. Demak	279,992,836
10	Kab. Grobogan	233,979,852
11	Kab. Jepara	125,150,404
12	Kab. Karanganyar	263,105,536
13	Kab. Kebumen	119,722,091
14	Kab. Kendal	424,776,523
15	Kab. Klaten	241,989,596
16	Kab. Kudus	3,290,673,993
17	Kab. Magelang	155,356,804
18	Kab. Pati	212,527,236
19	Kab. Pekalongan	118,526,774
20	Kab. Pemalang	117,942,529
21	Kab. Purbalingga	156,876,893
22	Kab. Purworejo	118,725,109
23	Kab. Rembang	115,763,681
24	Kab. Semarang	135,186,228
25	Kab. Sragen	122,702,139
26	Kab. Sukoharjo	128,800,881
27	Kab. Tegal	143,305,102
28	Kab. Temanggung	399,090,818
29	Kab. Wonogiri	115,387,056
30	Kab. Wonosobo	175,455,748
31	Kota Magelang	114,699,785
32	Kota Pekalongan	153,051,808
33	Kota Salatiga	155,864,203
34	Kota Semarang	381,209,617
35	Kota Surakarta	128,465,761
36	Kota Tegal	118,545,404

No.	Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau
IV	Total se-Provinsi D.I. Yogyakarta	366,682,526
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	110,004,758
2	Kab. Bantul	73,336,505
3	Kab. Gunung Kidul	36,668,252
4	Kab. Kulon Progo	55,002,379
5	Kab. Sleman	51,335,554
6	Kota Yogyakarta	40,335,078
V	Total se-Provinsi Jawa Timur	24,012,376,847
1	Provinsi Jawa Timur	7,203,713,061
2	Kab. Bangkalan	193,426,477
3	Kab. Banyuwangi	203,436,460
4	Kab. Blitar	326,402,970
5	Kab. Bojonegoro	648,232,541
6	Kab. Bondowoso	332,951,708
7	Kab. Gresik	197,562,593
8	Kab. Jember	355,825,971
9	Kab. Jombang	347,173,237
10	Kab. Kediri	1,620,159,425
11	Kab. Lamongan	299,348,746
12	Kab. Lumajang	231,069,042
13	Kab. Madiun	235,095,070
14	Kab. Magetan	216,716,979
15	Kab. Malang	1,054,049,971
16	Kab. Mojokerto	251,594,693
17	Kab. Nganjuk	348,290,981
18	Kab. Ngawi	305,485,558
19	Kab. Pacitan	220,012,192
20	Kab. Pamekasan	741,412,919
21	Kab. Pasuruan	1,565,999,307
22	Kab. Ponorogo	233,517,841
23	Kab. Probolinggo	422,643,967
24	Kab. Sampang	251,955,189
25	Kab. Sidoarjo	383,780,675
26	Kab. Situbondo	222,007,337
27	Kab. Sumenep	533,714,719
28	Kab. Trenggalek	222,292,323
29	Kab. Tuban	248,010,860
30	Kab. Tulungagung	431,298,657

No.	Daerah	DBH Cukai Hasil Tembakau
31	Kota Blitar	219,399,254
32	Kota Kediri	1,644,766,527
33	Kota Madiun	197,040,258
34	Kota Malang	706,269,545
35	Kota Mojokerto	219,805,111
36	Kota Pasuruan	224,573,652
37	Kota Probolinggo	193,944,340
38	Kota Surabaya	555,965,462
39	Kota Batu	203,431,229
Total		42,529,109,386

MENTERI KEUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO